



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **114085**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	120.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	275.328
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	145.275.328
III. HUTANG	Rp.	120.451.543
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.823.785

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : EMI LIANA
- Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
- NHK : 113421

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1064 m2/210 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, WARISAN Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	55.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1994, LAINNYA Rp. 55.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.084.879
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	211.084.879
III. HUTANG	Rp.	126.769.472
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	84.315.407

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASAN ABDULLAH SANYATA**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **630777**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.105.975.000

1. Tanah Seluas 2140 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 360.525.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 514.000.000
3. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 81.375.000
4. Tanah Seluas 667 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 150.075.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 28.900.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
4. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA STAR 86 CC Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 200.888.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 207.840.140



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.543.603.140
III. HUTANG	Rp.	149.430.887
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.394.172.253

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIS SRI ASTUTI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 622574

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
5. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.543.600.000

III. HUTANG Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.513.600.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.